

THE ROLE OF CIVIL SERVANTS IN PROMOTING RELIGIOUS MODERATION AND SUSTAINING ISLAMIC DA'WAH IN THE MODERN ERA: A CASE STUDY OF BANDUNG RELIGIOUS TRAINING CENTER

PERAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENGUATAN MODERASI BERAGAMA UNTUK KEBERLANJUTAN DAKWAH ISLAM DI ERA MODERN: STUDI KASUS PADA BALAI DIKLAT KEAGAMAAN BANDUNG

Ega Diah Pridayanti^{1*}

Haidar Ainurrahman²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

*Email: egadiahpridayanti@gmail.com

Abstract

This study examines the role of the State Civil Apparatus (Aparatur Sipil Negara/ASN) in strengthening religious moderation to support the sustainability of Islamic da'wah in the modern era, with a case study at the Bandung Religious Training Center (Balai Diklat Keagamaan / BDK Bandung). It is motivated by contemporary challenges to Islamic da'wah, including the proliferation of extremist narratives in digital spaces, generational shifts, and the complexities of Indonesia's pluralistic and multicultural society. Using a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews with widyaiswara at BDK Bandung, as well as analysis of training practices and the implementation of moderation values by ASN, particularly religious counselors. The findings indicate that ASN plays a strategic dual role as both public service agents and da'wah actors in disseminating key values of religious moderation, namely national commitment, tolerance, non-violence, and respect for local wisdom. Training in religious moderation significantly shapes the mindset, attitudes, and professional practices of ASN, enabling them to deliver Islamic da'wah in a more moderate, adaptive, and context-sensitive manner. This study concludes that strengthening religious moderation through ASN extends beyond policy implementation and constitutes a critical foundation for fostering inclusive, relevant, and sustainable Islamic da'wah in the context of rapid social and technological change.

Keywords: State Civil Apparatus; Religious Moderation; Islamic Da'wah; Religious Training Center; Digital Da'wah.

Article history: Submission Date: December 23, 2025 Revised Date: April 24, 2026 Accepted Date: April 27, 2026

PENDAHULUAN

Dakwah Islam di era modern menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi digital, dinamika sosial-politik, serta meningkatnya keberagaman masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural. Salah satu faktor yang mempengaruhi dinamika dakwah adalah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Kemajuan dalam bidang komunikasi, terutama dalam hal akses informasi, telah merubah cara masyarakat berinteraksi dan mendapatkan informasi (Nasution, 2024). Media sosial dan internet kini menjadi saluran utama dalam penyebaran pesan dakwah, bahkan mampu menjangkau audiens global khususnya melalui media sosial, telah memunculkan pergeseran otoritas keagamaan dari ruang-ruang tradisional menuju ruang digital yang cenderung terbuka dan tidak terkontrol. Berbagai studi menunjukkan bahwa ruang digital saat ini tidak hanya menjadi medium dakwah, tetapi juga menjadi arena kontestasi wacana keagamaan, termasuk menguatnya narasi keagamaan yang bersifat eksklusif, intoleran, dan cenderung ekstrem. Kondisi ini menimbulkan tantangan serius bagi keberlanjutan dakwah Islam yang berorientasi pada nilai rahmatan lil 'alamin (Nashoihiul, 2025).

Dalam konteks Indonesia, moderasi beragama diposisikan sebagai strategi nasional untuk menjaga harmoni sosial dan keberlanjutan kehidupan beragama di tengah keberagaman (Kementerian Agama RI, 2019). Moderasi beragama tidak dimaknai sebagai upaya memoderasi ajaran agama, melainkan sebagai pendekatan dalam cara berpikir, bersikap, dan berperilaku beragama agar tidak terjebak pada ekstremisme maupun liberalisme berlebihan (Quraish Shihab, 2019). Konsep ini sejalan dengan prinsip wasathiyah dalam Islam yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan penghormatan terhadap realitas sosial-budaya (Kamali, 2015; Rohman & Nugraha, 2021). Oleh karena itu, penguatan moderasi beragama menjadi fondasi penting bagi dakwah Islam yang kontekstual, inklusif, dan berkelanjutan.

Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya yang berada di bawah Kementerian Agama, memiliki posisi strategis dalam implementasi moderasi beragama karena berperan sebagai pelayan publik sekaligus aktor dakwah struktural melalui fungsi pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan keagamaan (Sarah, 2021; Yusuf, 2022). Penyuluh agama, penghulu, dan widyaiswara merupakan garda terdepan dalam mentransformasikan nilai-nilai moderasi beragama kepada masyarakat. Hasil wawancara dengan widyaiswara BDK Bandung menunjukkan bahwa penyuluh agama dipandang sebagai "penceramah negara" yang memiliki legitimasi sosial dan struktural untuk menyampaikan dakwah yang menyejukkan serta menangkal narasi ekstrem yang berkembang di masyarakat dan media digital.

Balai Diklat Keagamaan (BDK) Bandung memainkan peran penting sebagai institusi yang menjembatani kebijakan negara dengan praktik dakwah di tingkat akar rumput. Melalui pelatihan penguatan moderasi beragama, BDK Bandung tidak hanya mentransfer pengetahuan konseptual, tetapi juga membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku ASN agar mampu menerapkan empat indikator moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penghormatan terhadap kearifan lokal. Pendekatan ini menegaskan bahwa dakwah moderat tidak bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan justru berakar pada substansi ajaran Islam itu sendiri yang mengedepankan nilai kemaslahatan, kebijaksanaan, dan adaptasi budaya.

Lebih lanjut, temuan lapangan menunjukkan bahwa keberlanjutan dakwah Islam di era digital sangat ditentukan oleh kemampuan ASN dan penyuluh agama dalam beradaptasi dengan karakteristik generasi muda serta memanfaatkan media digital secara kreatif dan persuasif. Dakwah tidak lagi efektif jika hanya mengandalkan metode ceramah konvensional, tetapi harus dikembangkan secara variatif melalui konten digital yang singkat, kontekstual, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa dakwah merupakan proses dinamis yang harus senantiasa bertransformasi mengikuti perubahan zaman (Rakhmat, 2018).

Untuk bisa menjembatani adanya hubungan antara peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan juga dakwah Islam, penelitian ini akan menempatkan ASN sebagai aktor dakwah struktural dalam kerangka komunikasi publik keagamaan (Rohman, & Nugraha, 2017). Berbeda dengan dakwah yang secara normatif yang mana akan dipahami sebagai aktivitas penyiaran ajaran Islam dalam ruang keagamaan, peran yang dilakoni ASN bersifat lebih luas dan berada dalam wilayah pelayanan publik lintas agama dan juga lebih multikultural. Maka dari itu, dakwa dalam konteks ASN tidak bisa dimaknai secara eksklusif sebagai penyebaran agama Islam, melainkan proses internalisasi nilai-nilai keislaman yang moderat ke dalam ruang sosial yang plural dan juga melalui pendekatan institusional dan juga komunikatif.

Maka dalam konteks ini, ASN berfungsi sebagai seorang mediator utama antara nilai-nilai normatif yang ada dalam Islam dan juga realitas sosial yang terjadi di lapangan, sehingga dakwah tidak lagi hanya berlangsung dalam ruang keagamaan secara tradisional, tetapi juga hadir dalam praktik birokrasi, pelayanan publik, dan pendidikan keagamaan secara formal. Maka dengan demikian, novelty penelitian ini akan terletak pada upaya untuk bisa mengkonseptualisasikan dakwah sebagai sebuah proses praktik komunikasi struktural yang dijalankan oleh negara melalui ASN, yang mana ini tidak hanya berorientasi pada penyampaian ajaran, tetapi juga pada penguatan kohesi sosial, moderasi beragama, dan juga stabilitas kebangsaan di tengah-tengah masyarakat yang plural.

Meskipun berbagai kajian telah membahas moderasi beragama dan dakwah Islam secara konseptual, penelitian yang secara spesifik mengkaji peran ASN melalui lembaga diklat keagamaan sebagai aktor kunci dalam keberlanjutan dakwah Islam masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi celah kajian tersebut dengan menelaah secara mendalam bagaimana peran ASN, melalui pelatihan moderasi beragama di BDK Bandung, berkontribusi terhadap penguatan dakwah Islam yang moderat, adaptif, dan berkelanjutan di era modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penguatan moderasi beragama guna mendukung keberlanjutan dakwah Islam di era modern. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menangkap pengalaman, makna, dan konteks sosial yang kompleks yang tidak dapat diukur secara numerik serta memberikan pemahaman komprehensif terhadap fenomena yang terjadi di Balai Diklat Keagamaan (BDK) Bandung. Studi kasus merupakan strategi penelitian yang memungkinkan peneliti mempelajari fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata secara holistik dan mendalam dan sesuai dengan tujuan penelitian ini yang berupaya menggali peran ASN sebagai aktor dakwah dalam konteks institusi pendidikan keagamaan.

Subjek penelitian ini adalah widyaiswara dan ASN yang terlibat dalam pelatihan moderasi beragama di BDK Bandung. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu memilih responden yang memiliki pengalaman, tanggung jawab, dan pengetahuan relevan dengan fokus penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen. Wawancara mendalam dipilih karena mampu merinci pandangan informan mengenai peran ASN dan dinamika moderasi beragama di lingkungan institusi pelatihan keagamaan. Dan Pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan keterwakilan pengetahuan dan pengalaman mereka dalam konteks moderasi beragama dan dakwah Islam, serta kemampuan mereka memberikan data empirik yang kaya untuk dianalisis (Rustamana :2024).

Pendekatan studi kasus kualitatif dipandang tepat karena mampu membongkar dinamika internal peran ASN dalam konteks nyata dan memberikan wawasan yang mendalam berkaitan dengan implementasi moderasi beragama melalui pelatihan formal. Pendekatan ini juga konsisten dengan prinsip penelitian kualitatif yang menekankan eksplorasi fenomena sosial secara holistik dan kontekstual tanpa mengabaikan struktur dan proses yang terjadi dalam lingkungan institusi pelatihan dakwa. Dengan demikian, metode yang digunakan dalam penelitian ini memastikan bahwa data yang diperoleh valid, terpercaya, dan mampu menjawab tujuan penelitian secara komprehensif, yakni menjelaskan peran ASN dalam penguatan moderasi beragama dan implikasinya terhadap praktik dakwah Islam di era modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Strategis ASN dalam Penguatan Moderasi Beragama

Penguatan moderasi beragama di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak berlangsung dalam ruang yang terlepas dari pengalaman sosial, melainkan tumbuh dari dinamika empiris yang dihadapi langsung oleh penyuluh agama dan widyaiswara. Hasil wawancara dengan widyaiswara Balai Diklat Keagamaan (BDK) Bandung menunjukkan bahwa moderasi beragama dipahami bukan semata sebagai produk kebijakan negara, melainkan sebagai respons terhadap realitas keberagamaan masyarakat yang semakin kompleks, ditandai oleh menguatnya polarisasi identitas, penyebaran narasi keagamaan ekstrem di ruang digital, serta perubahan orientasi keberagamaan generasi muda. Fenomena ini

menegaskan bahwa ruang digital di Indonesia telah menjadi arena kontestasi wacana keagamaan yang sering kali bersifat emosional dan ideologis.

Dalam konteks tersebut, ASN menempati posisi strategis sebagai aktor yang menjembatani nilai-nilai keagamaan dengan realitas sosial masyarakat yang plural dan multikultural. Peran ini menempatkan ASN tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan publik, tetapi juga sebagai agen dakwah struktural yang memiliki legitimasi sosial dan institusional. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa ASN Kementerian Agama, khususnya penyuluh agama, memiliki fungsi ganda sebagai pelayan publik dan komunikator keagamaan yang berperan penting dalam menjaga harmoni sosial.

Peran ASN dalam penguatan moderasi beragama merupakan aspek penting dalam kebijakan dakwah nasional di Indonesia, khususnya melalui lembaga Balai Diklat Keagamaan (BDK) Bandung. ASN di BDK tidak melakukan dakwah langsung kepada masyarakat, tetapi berperan sebagai fasilitator pelatihan bagi penyuluh agama, guru, dan penghulu yang menjadi ujung tombak dalam penyebaran nilai moderasi beragama. Posisi ini menjadikan ASN sebagai *agent of change* yang mentransformasikan kebijakan moderasi beragama menjadi praktik dakwah yang lebih efektif di masyarakat.

Dalam konteks kebijakan nasional, moderasi beragama dipahami sebagai cara beragama yang moderat—yakni keseimbangan dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku yang menghormati pluralitas (*tawasuth, tawazun, tasamuh*). Konsep ini dikenal dalam tradisi Islam sebagai *ummatan wasathan* yang menekankan toleransi, keseimbangan, dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan beragama dan berbangsa. Konsep moderasi ini banyak dikembangkan dalam literatur pendidikan Islam untuk menjembatani konflik sosial dan menguatkan nilai inklusif dalam masyarakat plural (Harahap et al., 2023).

Pentingnya peran ASN dalam penguatan moderasi beragama juga didukung oleh kerangka pelayanan publik yang inklusif. Moderasi beragama dalam konteks pelayanan publik berupaya menjembatani netralitas birokrasi dengan harmoni sosial di masyarakat yang multikultural (Hafith et al., 2025). ASN, sebagai pelayan publik, dituntut menginternalisasikan nilai moderasi ini sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak bersifat diskriminatif, melainkan adil dan menghormati perbedaan keyakinan. Hal ini mencerminkan integrasi prinsip moderasi beragama ke dalam budaya birokrasi serta praktik kerja harian ASN.

ASN di BDK Bandung menjalankan peran strategis melalui pelatihan penguatan moderasi beragama yang sistematis. Pelatihan tersebut tidak hanya memperkenalkan konsep moderasi, tetapi juga membekali peserta dengan keterampilan penyusunan materi dakwah yang inklusif dan kontekstual (Nugraha, 2020). Peran ASN sebagai *train-the-trainer* memungkinkan para penyuluh agama mengadaptasi nilai moderasi ke dalam dakwah yang mereka sampaikan kepada masyarakat luas, sehingga dakwah moderat menjadi preskriptif sekaligus aplikatif. Intervensi ini sejalan dengan peran pendidikan Islam yang ditujukan untuk mendorong sikap saling menghargai perbedaan dan menciptakan lingkungan sosial yang kondusif (Arifin & Huda, 2024).

Tantangan yang dihadapi dalam penguatan moderasi beragama terutama berasal dari dinamika sosial informasi di era digital, di mana narasi ekstrem sering kali menguasai ruang media sosial dan berpotensi memicu konflik. Dalam situasi ini, ASN melalui peran penyuluh agama tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga fungsi konsultatif dan advokatif agar masyarakat dapat merespons narasi yang tidak moderat dengan pengetahuan yang benar dan berimbang. Peran ini penting untuk meredam potensi konflik yang muncul akibat narasi intoleran secara digital, sebagaimana dikaji dalam konteks moderasi beragama dan konflik di era digital (Abdul Rauf et al., 2024).

Selain itu, konstruksi moderasi beragama oleh ASN juga mencakup upaya penguatan kapasitas dakwah di era digital. ASN didorong untuk memanfaatkan media digital secara strategis, sehingga dakwah moderat dapat menjangkau generasi muda yang lebih peka terhadap media sosial. Transformasi ini menunjukkan bahwa perkembangan metode dakwah bukan hanya inovasi teknologi, tetapi juga respons terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer dalam menginternalisasi nilai moderasi beragama.

Secara keseluruhan, ASN berperan sebagai fasilitator kebijakan, mediator interpretasi nilai moderasi, dan penggerak inovasi dakwah yang adaptif terhadap konteks sosial dan digital. Peran strategis ini tidak hanya memperkuat moderasi beragama secara institusional, tetapi juga menjamin keberlanjutan dakwah Islam yang inklusif, relevan, dan harmonis

dengan nilai kebangsaan. Upaya ini mendukung citra Islam moderat sebagai jembatan antara dakwah Islam dan nilai edukatif kebangsaan, sehingga mampu menjawab tantangan pluralitas dan dinamika sosial secara berkelanjutan.

Pelaksanaan dan Strategi Pelatihan Moderasi Beragama di BDK Bandung

Pelatihan moderasi beragama yang diselenggarakan BDK Bandung menjadi ruang transformasi penting dalam membentuk cara pandang ASN terhadap dakwah Islam. Moderasi beragama dipahami sebagai cara beragama yang menekankan keseimbangan antara kesalehan individual dan tanggung jawab sosial, bukan sebagai upaya mereduksi ajaran Islam. Informan menegaskan bahwa nilai-nilai moderasi beragama seperti toleransi, anti-kekerasan, komitmen kebangsaan, dan penghormatan terhadap kearifan lokal harus terinternalisasi dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak ASN. Pemahaman ini sejalan dengan konsep moderasi beragama yang dirumuskan Kementerian Agama Republik Indonesia (2019), serta prinsip *wasathiyyah* dalam Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan (Kamali, 2015).

Pelatihan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta penyuluh agama sebagaimana diwujudkan oleh Widyaiswara Balai Diklat Keagamaan, yang bertugas melatih penyuluh, guru agama, dan penghulu sejak peluncuran program tahun 2021 hingga kini. Struktur pelatihan moderasi beragama mencerminkan upaya pemerintah melalui integrasi multilevel—lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah—untuk memperluas pemahaman moderasi secara institusional dan praktis di masyarakat.

Pelaksanaan pelatihan pada BDK Bandung menekankan penggunaan instrumen konseptual dan praktis. ASN sebagai fasilitator pertama kali dibekali dengan konsep moderasi beragama yang komprehensif, mencakup keseimbangan cara berpikir, sikap, dan tindakan toleran dalam konteks sosial plural. Konsep ini didukung oleh kajian akademik yang menegaskan bahwa moderasi beragama dalam pendidikan atau pelatihan efektif bila menekankan aspek keseimbangan dan toleransi dalam praktik kehidupan beragama (Arifin & Huda, 2024).

Strategi pelatihan di BDK Bandung juga mencakup penyusunan materi yang mencerminkan kebutuhan tugas penyuluh agama, yakni tidak hanya fokus pada akidah atau ritual, tetapi juga pada keterampilan dakwah yang moderat, santun, dan kontekstual. Hal ini serupa dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa pelatihan moderasi beragama yang efektif harus melibatkan pendekatan yang aplikatif—misalnya diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi—untuk memberdayakan peserta mengembangkan praktik moderasi di lingkungan mereka masing-masing (Kusumaningrum et al., 2023).

Dalam pelaksanaannya, pelatihan tidak hanya berorientasi pada penyampaian teori, tetapi juga bagaimana peserta merancang tindak lanjut berupa penyusunan materi penyuluhan moderasi beragama yang kemudian diaplikasikan kepada kelompok binaan. Peserta pelatihan di BDK memiliki kelompok binaan minimal 4 unit, sehingga materi yang dikembangkan harus relevan dengan dinamika masyarakat di tingkat lokal. Strategi seperti ini memastikan bahwa nilai moderasi beragama tidak berhenti sebagai pengetahuan semata, tetapi berubah menjadi praktik dakwah yang kontekstual dan berdampak sosial.

Selain itu, respons terhadap tantangan kontemporer seperti arus informasi digital yang sering memuat narasi ekstrem menjadikan strategi pelatihan moderasi di BDK juga mencakup literasi media dan keterampilan komunikasi modern. Ini sangat penting karena penyuluh tidak hanya bertugas mengedukasi masyarakat secara langsung, tetapi juga mampu menjawab narasi-narasi yang berkembang di ranah digital yang berpotensi memecah-belah. Pendekatan ini sesuai dengan kajian yang menunjukkan bahwa pelatihan moderasi beragama harus memadukan pemahaman nilai moderasi dengan kemampuan mengelola narasi dalam konteks sosial dan budaya lokal (Muthoharoh et al., 2025).

Evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan di BDK Bandung mengidentifikasi kebutuhan untuk terus menambah komponen praktik. Widyaiswara menilai bahwa pelatihan perlu lebih banyak memuat kegiatan praktik implementasi di lapangan dan monitoring pascapelatihan, terutama bagi penyuluh yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Evaluasi semacam ini selaras dengan rekomendasi studi akademik yang menyatakan bahwa efektivitas pelatihan moderasi beragama bergantung pada evaluasi kurikulum dan metode pelatihan agar sesuai dengan tantangan lokal dan dinamika sosial (Santoso et al., 2025).

Secara keseluruhan, strategi pelatihan moderasi beragama di BDK Bandung mencakup tiga aspek utama: materi kontekstual, metodologi partisipatif, dan orientasi implementatif. Pendekatan ini tidak hanya membekali ASN dan penyuluh dengan pemahaman konseptual moderasi, tetapi juga mentransformasikannya menjadi keterampilan praktek dakwah yang moderat, responsif terhadap keragaman, serta adaptif terhadap tantangan digital dan sosial kontemporer. Pelatihan ini berperan sebagai jembatan antara kebijakan moderasi beragama tingkat nasional dengan praktik dakwah yang relevan di masyarakat lokal.

Transformasi Pola Pikir dan Praktik Dakwah ASN

Narasi wawancara menunjukkan adanya pergeseran orientasi dakwah penyuluh agama pascapelatihan. Dakwah yang sebelumnya berfokus pada penyampaian normatif ajaran akidah dan ibadah mulai berkembang ke arah penguatan nilai kebersamaan, toleransi, dan pencegahan konflik keagamaan. Pergeseran ini mencerminkan kesadaran bahwa dakwah tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial tempat ia dijalankan. Hal ini sejalan dengan pandangan Rakhmat (2018) yang menekankan bahwa efektivitas dakwah sangat ditentukan oleh kemampuan dai membaca kondisi psikologis dan sosial audiensnya.

Moderasi beragama tidak dipahami sekadar sebagai istilah konseptual, tetapi sebagai perubahan cara berpikir, sikap, dan perilaku beragama yang berimbang, toleran, dan menghargai perbedaan (Abrohman, wawancara). Transformasi ini bersifat epistemik dan normatif karena menysar pola mental ASN dan penyuluh sebelum diterapkan dalam praktik dakwah di masyarakat.

Pelatihan yang dilaksanakan di BDK Bandung menekankan pembacaan ulang terhadap peran dakwah yang tidak lagi hanya berfokus pada substansi ritual dan akidah, tetapi juga pada bagaimana dakwah disampaikan secara *akhlaqiyah* yang moderat, santun, dan dialogis. Hal ini sejalan dengan studi yang menegaskan bahwa dakwah efektif membutuhkan perubahan pola pikir dari ceramah satu arah menjadi komunikasi persuasif yang menghormati keragaman sosial (Hamid & Kusri, 2023). Pendekatan semacam ini mendorong ASN untuk menyusun materi dakwah yang lebih inklusif, mengintegrasikan moderasi beragama dalam konteks kebangsaan dan kehidupan sehari-hari.

Lebih jauh, transformasi praktik dakwah ASN juga mencakup respons terhadap tantangan informasi digital yang cepat dan sering berbasis narasi ekstrem. Penyuluh dilatih untuk tidak hanya menjadi *pemberi materi*, tetapi juga pengelola informasi yang kritis dan komunikator moderat yang bisa memberikan literasi keagamaan berbasis dalil ketika menghadapi narasi yang bertentangan dengan prinsip moderasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan pentingnya meningkatkan kapasitas literasi dakwah digital bagi penyuluh agama agar pesan moderat dapat bersaing di ruang media sosial (Ramli et al., 2025).

Secara praktis, transformasi ini menciptakan pola praktik dakwah yang lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat plural—di mana ASN dan penyuluh tidak lagi menjadi sekadar penyampai hukum dan ritual, tetapi juga fasilitator dialog, konsultasi, dan advokasi dalam kehidupan beragama. ASN yang sudah mengalami transformasi berpikir dan praktik dakwah diharapkan mampu mengubah dinamika konflik sosial menjadi ruang *coexistence* yang produktif, sesuai dengan prinsip moderasi beragama yang menolak kekerasan dan mengutamakan toleransi (Sukmawati & Ardana, 2024).

Transformasi berpikir dan praktik ini menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan dakwah Islam di era modern, karena umat tidak hanya membutuhkan pemahaman agama, tetapi juga cara penyampaian yang relevan dengan konteks sosial-budaya kontemporer. Pendekatan moderat ini menempatkan ASN sebagai agen integratif antara ajaran Islam dan nilai-nilai kebangsaan yang menjunjung toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan—suatu fenomena yang telah terbukti mampu mengurangi potensi konflik antar-komunitas dalam masyarakat plural (Huda & Fadli, 2022).

Tantangan Dakwah Islam di Era Modern

Dalam era digital, hasil penelitian memperlihatkan bahwa tantangan dakwah Islam semakin kompleks. Informan mengungkapkan bahwa masyarakat, terutama generasi muda, lebih banyak memperoleh pemahaman keagamaan melalui media sosial dibandingkan melalui forum keagamaan konvensional. Dalam situasi ini, ASN dituntut untuk tidak hanya menguasai substansi keagamaan, tetapi juga memahami logika komunikasi digital agar mampu menghadirkan dakwah yang moderat dan kompetitif di ruang publik virtual.

Keberlanjutan dakwah Islam sangat ditentukan oleh kemampuan dakwah tersebut untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi. ASN yang memperoleh pelatihan moderasi beragama cenderung lebih reflektif dan berhati-hati dalam menyampaikan pesan keagamaan. Mereka tidak hanya mempertimbangkan kebenaran normatif pesan dakwah, tetapi juga dampak sosial yang ditimbulkannya. Pendekatan ini menegaskan bahwa dakwah Islam di era modern tidak cukup bertumpu pada kekuatan teks dan otoritas simbolik, melainkan memerlukan kebijaksanaan dalam membaca konteks sosial yang terus berubah.

Tantangan dakwah Islam di era modern sangat kompleks, terutama dipengaruhi oleh dinamika sosial, budaya, dan teknologi yang berubah cepat. Tantangan ini menjadi signifikan dalam konteks keberlanjutan dakwah karena masyarakat kini tidak hanya menerima informasi dari pemuka agama formal, tetapi dari berbagai sumber di ruang publik, terutama media digital dan media sosial, yang kerap menampilkan narasi yang ekstrem, tidak akurat, atau bertentangan dengan prinsip moderasi beragama. Fenomena ini mirip dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa tantangan dakwah kontemporer mencakup perubahan media komunikasi serta hilangnya otoritas tunggal dalam penyampaian pesan keagamaan, sehingga siapa pun dapat menyampaikan pandangan keagamaan secara daring tanpa verifikasi ilmiah yang kuat (Srigita & Rifai, 2025).

Salah satu tantangan signifikan adalah overload informasi di media sosial, di mana umat Muslim, khususnya generasi muda, lebih banyak mengakses konten keagamaan melalui platform digital seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Di satu sisi, ruang digital ini memberikan peluang dakwah yang lebih luas, tetapi di sisi lain juga menghadirkan risiko pesan yang *out of context*, radikal, atau simplistik yang mudah disebarkan. Ketidakbijakan dalam menggunakan teknologi ini dapat memunculkan konten yang *counterproductive* terhadap moderasi beragama, mengakibatkan polarisasi dan kesalahpahaman dalam masyarakat. Studi menegaskan bahwa tantangan ini memerlukan penyesuaian strategi dakwah melalui penggunaan bahasa komunikasi yang efektif, konten digital yang baik, serta peningkatan literasi digital di kalangan dai agar pesan moderat dapat bersaing secara konstruktif di ranah teknologi (Hariri, 2024).

Wawancara juga mencatat bahwa tantangan dakwah tidak hanya bersifat teknologi, tetapi juga kultural dan sosial. Sebagai contoh, keberagaman budaya lokal yang kaya memerlukan pendekatan dakwah yang ramah *akulturatif*, bukan normatif atau dogmatisistik semata. Dakwah yang terlalu kaku atau tidak responsif terhadap kearifan lokal berpotensi ditolak masyarakat atau bahkan memperkuat pandangan ekstrem yang menjauhkan umat dari moderasi. Hal ini sejalan dengan kajian yang menekankan pentingnya adaptasi metode dakwah dalam menghadapi perubahan zaman, dimana dai harus menyesuaikan gaya penyampaian dengan konteks audiens modern, misalnya melalui pendekatan komunikasi digital dan kreativitas konten (Hidayat, 2024).

Tantangan lain yang diidentifikasi adalah perubahan karakter audiens, terutama di kalangan generasi milenial dan Gen Z yang tumbuh dalam *Information Age*. Mereka cenderung selektif, kritis terhadap otoritas tradisional, dan lebih tertarik pada konten yang interaktif serta relevan dengan kehidupan sehari-hari. Situasi ini memaksa penyuluh dan ASN untuk berinovasi dalam metodologi dakwah, tidak hanya mengandalkan ceramah konvensional, tetapi juga melalui narasi digital, storytelling yang kontekstual, dan pendekatan multimedia yang mampu menembus "kelelahan informasi" yang dialami audiens modern. Studi terkait menyatakan bahwa dakwah yang efektif harus menggabungkan adaptasi teknologi dengan penguatan kompetensi komunikasi agar pesan dakwah tetap relevan dan berdampak (Alhaq, 2025).

Dalam praktik pelatihan, tantangan lain adalah menghadapi peserta yang awalnya memiliki pemahaman ekstrem atau bias terhadap agama, baik ke kanan maupun ke kiri. ASN harus mampu menyediakan ruang diskusi dan dialog yang mendalam sehingga peserta dapat memahami konsep moderasi bukan sebagai pendangkalan agama, tetapi sebagai implementasi ajaran Islam yang toleran dan inklusif. Tantangan ini memerlukan ASN dan penyuluh agama untuk memiliki kemampuan konsultatif, edukatif, dan advokatif, agar mereka tidak hanya menjadi penyampai materi, tetapi juga pembimbing proses internalisasi moderasi dalam kehidupan umat. Pendekatan semacam ini sejalan dengan literatur yang menggarisbawahi perlunya pendidikan keagamaan yang responsif secara sosial dan dialogis untuk menghadapi tantangan dakwah modern (Nurjanah, 2024).

Secara keseluruhan, tantangan dakwah Islam di era modern meliputi teknologi digital, perubahan pola komunikasi, keragaman budaya dan audiens, serta persepsi ekstremisme yang memerlukan strategi moderasi beragama yang holistik. ASN dan penyuluh agama dituntut untuk memperluas keterampilan dakwah, menguasai media digital, serta membangun

narasi moderat yang kontekstual dengan kehidupan kontemporer. Penyesuaian ini bukan hanya untuk mencapai efektivitas dakwah, tetapi juga untuk menjaga keharmonisan sosial di tengah pluralitas masyarakat, sehingga dakwah Islam tetap relevan dan berkontribusi pada perdamaian serta kesejahteraan umat.

Agar bisa memberikan gambaran yang lebih lengkap serta lebih sistematis pada temuan-temuan penelitian, maka diperlukan adanya pemetaan mengenai aspek-aspek utama yang menjadi bahan fokus dalam pembahasan. Pemetaan ini memiliki tujuan untuk menegaskan adanya keterkaitan antara peran Aparatur Sipil Negara (ASN), strategi pelatihan moderasi beragama, transformasi dalam praktik dakwah, serta tantangan yang akan dihadapi dalam konteks di era digital. Dengan demikian, diharapkan **Tabel 1** berikut dapat merangkum poin-poin kunci yang menjadi bahan temuan utama pada penelitian ini, sekaligus juga bisa memperlihatkan implikasinya terhadap keberlanjutan dakwah islam yang moderat dan juga adaptif.

Tabel 1. Deskripsi Temuan dan Implikasi

NO	Aspek Utama	Temuan Penelitian	Implikasi
1	Peran ASN	ASN sebagai fasilitator, mediator, dan aktor dakwah struktural	Menguatkan posisi ASN sebagai agen dari moderasi beragama
2	Strategi Pelatihan	Materi yang lebih Kontekstual, metode partisipatif, orientasi implementatif	Mendorong dakwah yang lebih adaptif dan juga aplikatif
3	Transformasi Dakwah	Dari normatif ke arah dialogis dan juga lebih persuasif	Mendorong agar dakwah lebih relevan dengan pola masyarakat modern
4	Tantangan	Media digital, narasi ekstrem, perubahan generasi	Perlu adanya inovasi dari sisi praktik dakwah yang memiliki basis teknologi
5	Dampak	Penguatan moderasi beragama dan juga harmoni sosial	Menjamin adanya keberlanjutan dari praktik dakwah islam

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan moderasi beragama di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan proses yang lahir dari dinamika empiris keberagamaan masyarakat Indonesia yang semakin kompleks, khususnya di tengah menguatnya polarisasi identitas, arus informasi digital yang tidak terkontrol, serta perubahan orientasi keberagamaan generasi muda. Moderasi beragama tidak dipahami semata sebagai kebijakan normatif negara, melainkan sebagai respons strategis terhadap tantangan sosial-keagamaan yang nyata dan terus berkembang.

ASN, khususnya yang berada di lingkungan Kementerian Agama, menempati posisi strategis sebagai penghubung antara kebijakan negara, nilai-nilai keagamaan, dan realitas sosial masyarakat yang plural dan multikultural. Melalui peran ganda sebagai pelayan publik dan komunikator keagamaan, ASN berfungsi sebagai agen dakwah struktural yang memiliki legitimasi institusional sekaligus tanggung jawab moral dalam menjaga harmoni sosial. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan moderasi beragama tidak dapat dilepaskan dari kapasitas ASN dalam menerjemahkan nilai moderasi ke dalam praktik pelayanan publik dan dakwah yang inklusif serta nondiskriminatif.

Balai Diklat Keagamaan (BDK) Bandung berperan penting sebagai ruang transformasi kebijakan moderasi beragama menjadi praktik dakwah yang aplikatif. Melalui pelatihan yang sistematis, ASN berfungsi sebagai *train-the-trainer* yang membekali penyuluh agama, guru, dan penghulu dengan pemahaman konseptual sekaligus keterampilan praktis dalam menyusun dan menyampaikan dakwah moderat. Model pelatihan yang mengintegrasikan materi kontekstual, metodologi partisipatif, serta orientasi tindak lanjut terbukti mendorong internalisasi moderasi beragama secara lebih berkelanjutan di tingkat masyarakat.

Hasil penelitian juga menunjukkan terjadinya transformasi pola pikir dan praktik dakwah ASN pascapelatihan. Dakwah tidak lagi dipahami semata sebagai penyampaian ajaran normatif, tetapi sebagai proses komunikasi sosial yang menekankan kebijaksanaan, dialog, toleransi, dan pencegahan konflik. Transformasi ini menjadi sangat relevan dalam menghadapi tantangan dakwah di era digital, di mana narasi ekstrem dan emosional sering mendominasi ruang publik virtual. ASN dan penyuluh agama dituntut untuk berperan tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pendidik, konsultan, dan advokat moderasi beragama.

Dengan demikian, penguatan moderasi beragama oleh ASN berkontribusi signifikan terhadap keberlanjutan dakwah Islam yang inklusif, adaptif, dan selaras dengan nilai-nilai kebangsaan. Peran strategis ASN sebagai fasilitator kebijakan, mediator nilai, dan penggerak inovasi dakwah menegaskan bahwa moderasi beragama merupakan fondasi penting dalam menjaga kohesi sosial serta memperkuat citra Islam moderat di tengah pluralitas dan dinamika sosial masyarakat Indonesia.

REFERENSI

- Al Hariri, M. A. M., Ma'ruf, M. A., & Huda, S. A. A. (2024). Moderasi Beragama: Peluang dan Tantangan di Era Digital. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 5(2), 151-158.
- Alhaq, D. L. (2025). Strategi Dakwah Di Media Digital: Studi Kasus PBNU dan Muhammadiyah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *MADDINA: Jurnal Manajemen Dakwah*, 2(1), 49-68.
- Arifin, B., & Huda, H. (2024). *Moderasi Beragama sebagai Pendekatan dalam Pendidikan Islam Indonesia*. TARLIM: Jurnal Pendidikan Agama Islam.
- Arifin, B., & Huda, H. (2024). *Moderasi Beragama sebagai Pendekatan dalam Pendidikan Islam Indonesia*. TARLIM: Jurnal Pendidikan Agama Islam.
- Hafith, A., Malik, A., & Winengan, et al. (2025). *Religious Moderation in Public Service Policy: Bridging Bureaucratic Neutrality and Social Harmony in Indonesia*. Multidisciplinary Indonesian Center Journal.
- Hamid, A., & Kusriani, I. (2023). *Transformative Communication in Religious Moderation: Building Inclusive Religious Discourse*. Journal of Religious Studies and Communication.
- Harahap, E. W., Sufriyansyah, S., & Samsudi, W. (2023). *Moderasi Beragama dalam Islam*. Edukais: Jurnal Pemikiran Keislaman.
- Hidayat, N. (2024). Tantangan dakwah NU di era digital dan disrupsi teknologi. *J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam*, 5(1), 45-54.
- Huda, M., & Fadli, A. (2022). *Moderate Islam as a Social Cohesion Mechanism in Plural Societies*. Journal of Religious Harmony.
- Kamali, M. H. (2015). *The middle path of moderation in Islam: The Qur'anic principle of wasatiyyah*. Oxford: Oxford University Press.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Moderasi beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kusumaningrum, H., Rubiyannah, R., & Fadhilla, I. (2023). *Empowering Religious Counselors as Agents of Religious Moderation in the Indonesian Ministry of Religious Affairs*. TARBIYA: Journal of Education in Muslim Society.
- Lim, M. (2018). Disinformation and religious extremism in Indonesia. *Journal of Asian Studies*, 77(2), 1–15.
- Mustain Nasoha, A. M., Atqiyavi, A. N., & Pratiwi, D. A., et al. (2025). *Moderasi Beragama sebagai Jembatan antara Dakwah Islam dan Pendidikan Kewarganegaraan*. Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan Indonesia.
- Muthoharoh, M., Samsuri, S., Nurdin, N., & Ni'matuz Zuhrah. (2025). *Strategi Sosialisasi Moderasi Beragama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara*. Jurnal Mercusuar: Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam.
- Nashoiul Ibad, M. (2025). *Strategi Literasi Dakwah Digital di Era Media Sosial TikTok: Tantangan dan Peluang*. Pelita: Jurnal Studi Islam Mahasiswa UII Dalwa.
- Nasution, S., & Hasibuan, Z. E. (2024). DINAMIKA DAN TANTANGAN DAKWAH ISLAM DI ERA MODERN. *Amsal Al-Qur'an: Jurnal Al-Qur'an dan Hadis*, 1(3), 279-289.
- Nugraha, F. (2020). *Pendidikan dan Pelatihan: Konsep dan Implementasi dalam Pengembangan Sumberdaya Manusia*. Litbangdiklat Press.
- Nurjanah, T. (2024). Literasi Digital dan Ketahanan Moderasi Beragama: Telaah Integratif dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam,3(1)
- Rakhmat, J. (2018). *Psikologi dakwah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ramli, R., Nasution, E., & Putri, L. (2025). *Digital Literacy and Religious Moderation: Empowering Islamic Counselors in the Era of Social Media*. Journal of Islamic Education and Media.

- Rauf, R. A., Tawakkal, A. T., & Lutfia, N., et al. (2024). *Peran Moderasi Beragama dalam Meredam Potensi Konflik di Era Digital*. Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam.
- Rohman, D. A., & Nugraha, F. (2017). *Menjadi Penyuluh Agama Profesional: Analisis Teoritis dan Praktis*. Lekkas.
- Rohman, D. A. & Nugraha, F. (2021). *Moderasi beragama dalam bingkai Keislaman di Indonesia*. Lekkas.
- Rustamana, A., Adillah, P. M., Maharani, N. K., & Fayyadh, F. A. (2024). *Qualitative research methods*. Indonesian Journal of Interdisciplinary Research in Science and Technology, 2(6),
- Santoso, A. G., Qorri 'Aina, M., Maknun, M. L., Muzayanah, U., & Noviani, N. L. (2025). *Pengukuran Sikap dan Pemahaman Moderasi Beragama Penyuluh dan Guru*. Dialog.
- Sarah, S. S. (2021). *Penyuluhan Agama Dalam Kemodernan Dan Kebhinekaan*. BKi UIN Bandung.
- Shihab, M. Q. (2019). *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang moderasi beragama*. Tangerang Selatan: Lentera Hati.
- Srigita, F. D., & Rifa'i, A. (2025). Contemporary Islamic Thought: Challenges and Solutions in Da'wah in the Digital Era. *Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian ke Islaman*, 12(1), 51-61.
- Sukmawati, S., & Ardana, R. (2024). *Moderasi Beragama dalam Konteks Multikultural Indonesia: Toleransi dan Penolakan Kekerasan*. Indonesian Journal of Interfaith Studies.
- Taufiq, F., & Alkholid, A. M. (2025). *Peran Kementerian Agama dalam Mempromosikan Moderasi Beragama di Era Digital*. Jurnal Ilmu Dakwah.
- Yusuf, M. Z., & Mutiara, D. (2022). Diseminasi Informasi Moderasi Beragama: Analisis Konten Website Kementerian Agama. *Dialog*, 45(1), 127-137.